

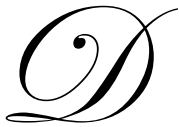
**LAPORAN KINERJA (LKj)
SEKRETARIAT DPR PAPUA
TAHUN ANGGARAN 2022**



**SEKRETARIAT DPR PAPUA
TAHUN 2022**

Jayapura, Februari 2023

KATA PENGANTAR



engan mengucapkan puji dan syukur ke Hadirat Allah Yang Maha Kuasa, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Sekretariat DPR Papua Tahun Anggaran 2022 .

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat DPR Papua Tahun 2022 disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)* dan *PERMENPAN* Nomor. 53 Tahun 2014 Tetang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi. Disamping itu, dalam meningkatkan kualitas pelayanan ini, dilakukan berbagai penyempurnaan terhadap sumber daya manusia yang ada serta system ketatalaksanaan yang berlaku yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dengan berakhirnya pelaksanaan Tahun Anggaran 2022 berarti Sekretariat DPR Papua telah menyelesaikan kegiatannya dikaitkan dengan implementasi dari Rencana Strategis 2018-2023 yang telah digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPR Papua dalam upaya memenuhi visi dan misinya. Selama tahun 2022, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana strategis telah berhasil dicapai.

Capaian kinerja Sekretariat DPR Papua untuk tahun 2022 ini kemudian dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Sekretariat DPR Papua Tahun 2022. Sebagai bentuk pengetahuan dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kami kepada para *stakeholders*.

Akhir kata, harapan kami agar Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat DPR Papua ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh anggota organisasi Sekretariat DPR Papua.

Jayapura, Februari 2023
SEKRETARIS DPR PAPUA

Dr. JULIANA J. WAROMI, SE.M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19660314 198603 2 012

RINGKASAN EKSEKUTIF

Seiring telah berakhirnya pelaksanaan APBD, sekretariat DPR Papua Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 31 Desember 2022, maka sesuai Instruksi Presiden No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)* dan PERMENPAN Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap instansi diwajibkan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Kinerja (LKj) secara berjenjang kepada instansi/unit atasannya. Sekretariat DPR Papua selaku bagian dari Pemerintah Provinsi Papua telah menyelesaikan implementasi Program Kerja Tahun Ke Tiga dari Rencana Strategi periode tahun 2018-2023 yang diwujudkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 . Implementasi ini telah memberikan arah yang jelas dalam upaya peningkatan kinerja Sekretariat DPR Papua untuk melaksanakan visinya, ***"Terwujudnya Pelayanan Prima Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPR Papua . Dan mencapai misinya, "Menjadikan Papua Bangit, Mandiri dan Sejahtera "***

LKj ini dapat berfungsi sebagai media pertanggungjawaban yang berisi informasi sekretariat DPR Papua dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar yang didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, kebijaksanaan yang transparan dan menjadikan Sekretariat DPR Papua yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsive khususnya terhadap lembaga DPR Papua yang dilayaninya, umumnya terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.

Dana yang tersedia pada Sekretariat DPR Papua setiap tahun dianggarkan dari APBD Provinsi Papua yang dialokasikan melalui DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan jumlah dana dalam APBD Tahun 2022 setelah perubahan sebesar **Rp. 602.324.222.000,- (Enam Ratus Dua Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah)** yang terdiri dari :

1. Belanja gaji	Rp. 95.779.359.429,-
2. Belanja Barang, dan Jasa	Rp. 487.802.006.071.-
3. Belanja Barang, Jasa dan Modal	<u>Rp. 18.742.856.500,-</u>
Total	Rp. 602,324.222.000,-

Realisasi Anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja tersebut yaitu rata-rata **93.68%** atau sebesar **Rp. 564.082.049.066,- (Lima Ratus Enam Puluh Empat Milyar Delapan Puluh Dua Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Enam Rupiah)** Pencapaian target kinerja Sekretariat DPR Papua Tahun 2022 dapat diwujudkan dengan dukungan pelaksanaan 3 (tiga) program dan 64 (enam puluh empat) kegiatan yang dibiayai oleh APBD tahun 2022.

Berdasarkan hasil penilaian tingkat pencapaian kinerja selama Tahun 2022 sesuai dengan perjanjian kinerja dengan 3 (tiga) sasaran 5 (lima) indikator mencapai 100%. Capaian kinerja yang diperoleh merupakan capaian kinerja yang sangat tinggi, dan akan terus ditingkatkan kinerjanya pada masa mendatang.

Jayapura, Februari 2023
SEKRETARIS DPR PAPUA

Dr. JULIANA J. WAROMI, SE.M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19660314 198603 2 012

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Tabel

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Dasar Hukum

D. Ruang Lingkup

E. Gambaran Umum Sekretariat DPR Papua

F. Struktur Organisasi

G. Tugas dan Fungsi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Ringkasan Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Anggaran

Bab IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Sasaran

Lampiran - lampiran :

1. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022
 2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
 3. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022
 4. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2022
 5. Matriks Capaian Target dan Realisasi Target
 6. Rekap Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan
-

BAB.I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna dan bertanggungjawab.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah secara rutin setiap tahunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) yang diharapkan mampu menyajikan informasi kepada seluruh pengguna laporan yang selalu menuntut akan keterbukaan dan ketetapan penyampaian informasi sesuai harapan.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai ditetapkan dalam Perda Provinsi Papua No. 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga Sekretariat DPR Papua menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) tahun 2022 . Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Sekretariat DPR Papua dan Program/Kegiatan melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sumber dana Sekretariat DPR Papua untuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2022 berasal dari APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022 .

Indikator Kinerja Sasaran merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPR Papua dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tingkat Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2022. Indikator Kinerja sasaran menggunakan indikator kinerja kunci yang dipilih dari beberapa output dan atau outcome dari kegiatan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input) yang mengutamakan penggunaan dana APBD Provinsi Papua.

Dengan adanya laporan kinerja ini dapat meningkatkan peran bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua untuk mendukung terciptanya **Good Governance** atau pemerintahan yang baik.

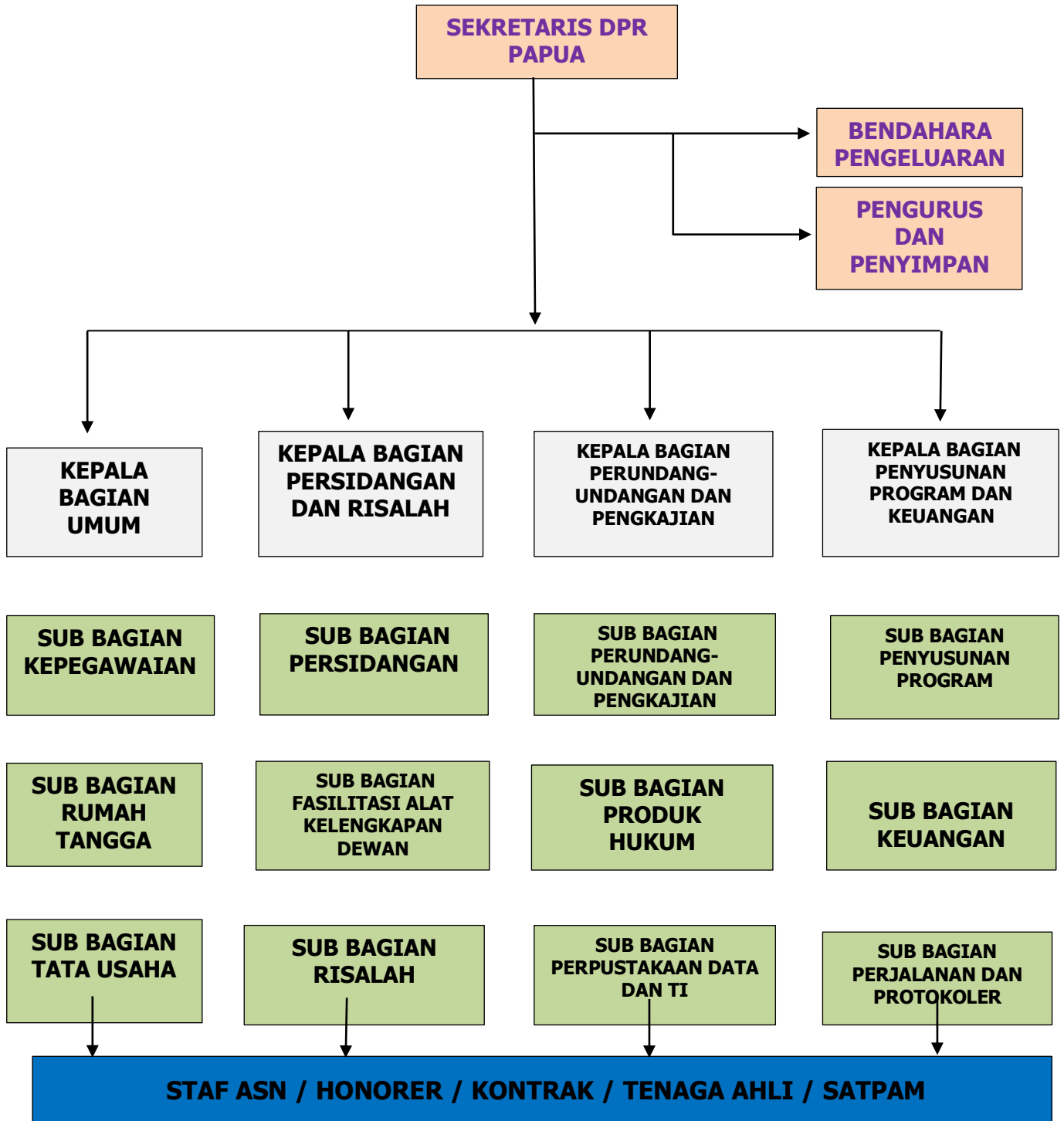
1.2 Gambaran Umum Organisasi

Sekretariat DPR Papua sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 14) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai Peraturan Provinsi Papua Nomor 36 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua

1.2.1 Struktur Organisasi

Sebagaimana organisasi birokrasi pada umumnya, struktur organisasi Sekretariat DPR Papua menjelaskan bagaimana tugas kerja akan dibagi dan dikelompokan serta dikoordinasikan secara formal, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 bahwa struktur Organisasi Sekretariat DPR Papua ditetapkan sebagai berikut :

Gambar 2. Bagan Organisasi Sekretariat DPR Papua
 Sesuai Perda No. 19 Tahun 2016



Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat DPR Papua memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

1. Sekwan

a. Bagian Umum, terdiri dari:

1. Sub Bagian Rumah Tangga
2. Sub Bagian Kepegawaian
3. Sub Bagian Tata Usaha

b. Bagian Persidangan dan Risalah, terdiri dari :

1. Sub Bagian Persidangan
2. Sub Bagian Risalah
3. Sub Bagian Fasilitasi Alat Kelengkapan Dewan

c. Bagian Penyusunan Progran dan Keuangan ,terdiri dari :

1. Sub Bagian Penyusunan Program
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Perjalanan

d. Bagian Perundang-undangan dan Pengkajian,terdiri dari :

1. Sub Bagian Perundang- undangan dan pengkajian
2. Sub Bagian Humas, TI dan Perpustakaan
3. Sub Bagian Produk Hukum

1.2.2 Susunan Pegawai

Kondisi kepegawaian pada Sekretariat DPR Papua per 31 Desember 2022 berdasarkan eselonering, kepangkatan dan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel. 1

Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah		Ket
		Formasi	Terisi	
1	Eselon II	1	1	
2	Eselon III	4	4	
3	Eselon IV	12	12	
4	Fungsional	-	-	
5	Pelaksana	93	93	

Tabel. 2
Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan

No	Pangkat	Jumlah Orang	Keterangan
1	Pembina Utama (IV/c)	1	-
	Pembina TK.I (IV/b)	3	
2	Pembina (IV/a)	2	-
3	Penata TK. I (III/d)	17	
4	Penata (III/c)	10	-
5	Penata Muda Tk 1 (III/b)	33	-
6	Penata Muda (III/a)	17	-
7	Pengatur Tk 1 (II/d)	5	-
8	Pengatur (II/c)	6	-
8	Pengatur Muda Tk 1 (II/b)	12	-
10	Pengatur Muda (II/a)	4	-
11	Juru (I/d)	-	-
12	Juru Muda (I/c)	-	-
Jumlah		114 Orang	
Sumber data Kepegawaian Sekretariat DPR PAPUA Papua Tahun 2022			

Tabel. 3
Data Pegawai Menurut Pendidikan

A. PNS

NO	URAIAN	PENDIDIKAN	JUMLAH	KET
1	Pendidikan Pasca Sarjana	S3	1 Orang	Baik
2	Pendidikan Paska Sarjana	S2	24 Orang	Baik
3	Pendidikan Sarjana	S1	47 Orang	Baik
4	Pendidikan Sarjana Muda	D III	4 Orang	Baik
5	Pendidikan Tingkat Menengah	SMA/SMU/SMK	38 Orang	Baik
6	Pendidikan Tingkat Pertama	SLTP	-	-
7	Pendidikan Dasar	SD	-	Baik
Total			114 Orang	Baik

B. NON PNS (TKK)

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Ket
1	Pasca Sarjana	-	
2	Sarjana	7 orang	
3	Sarjana Muda	-	
4	SLTA	19 orang	
5	SLTP	-	
6	SD	-	
JUMLAH		26 Orang	

C. TENAGA AHLI FRAKSI

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Ket
1	Pasca Sarjana	28 orang	
2	Sarjana	-	
3	Sarjana Muda	-	
4	SLTA	-	
5	SLTP	-	
6	SD	-	
	JUMLAH	28 orang	

1.2.3 Sarana dan Prasarana

Untuk melaksanakan unsur pelayanan dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi DPR Papua, Sekretariat DPR Papua memiliki aset tetap sebagai berikut :

No	Jenis Aset/Barang	Jumlah	Keadaan		
			Baik	Sedang	Rusak
1	2	3	4	5	6
1	Bangunan dan Gedung	3 Unit	3		
2	Rumah Dinas Pimpinan DPR PAPUAP	3 Unit	3		
3	Rumah Dinas Anggota DPR PAPUAP	45 Unit	45		
4	Mess DPR PAPUA Papua	1 Unit	1		
1	Kendaraan Roda 4	74 Unit	74	-	-
2	Bus	1 unit		-	1
3	Kendaraan Roda 2 (motor)	26 Unit	26		
4	Meja Biro	42 buah	14	10	18
5	Meja ½ Biro	174 buah	148	3	29
6	Kursi Kayu	219 buah	-	-	219
7	Kursi Putar	328 buah	50	114	164
8	Kursi Tamu	17 Set	16	-	1
9	Meja Rapat	56 Set	48	6	2
10	Podium	1 buah	1	-	-
11	Lemari Arsip	75 buah	41	-	-
12	Mesin Tik	7 unit	1	1	5
13	Camera	12 unit	4	5	3
14	Bendera Kecil dan Panjang	33 Lembar	-	17	16
15	Tiang Bendera dan Tiang Umbul	158 Batang	32	-	126

16	Umbul-Umbul	96 lembara	-	40	56
17	Filling Kabinet	24 buah	18	-	6
18	Wireless	6 unit	2	-	4
19	Rak Piring	4 buah	3	-	1
20	Komputer	38 unit	27	-	11
21	Mesin Potong Rumput	2 unit	1	-	1
22	AC	102 unit	79	-	23
23	Papan Tulis Gantung	10 buah	-	-	10
24	Faksimile	2 unit	1	-	1
25	Sound System	3 unit	3	-	-
26	Meja Serba Guna	4 unit	-	4	-
27	Meja Tanda Tangan	1 set	1	-	-
28	Papan Nama Anggota DPR PAPUA	95 buah	45	-	50
29	Kain Hordeng	1.398 meter	575	-	823
30	Mesin Photo Copy	1 unit	-	-	1
31	TV 20 inchi	7 unit	-	-	7
32	TV TCL	7 Unit	-	-	-
33	TV 32 inchi	1 unit	1	-	-
34	TV 29 inchi	3 unit	1	-	-
35	TV 34 inchi	1 unit	-	1	-
36	TV 42 LCD LG	1 unit	1	-	-
37	Tangga segi 3	4 buah	-	1	3
38	Tangga panjang	2 buah	-	1	1
39	Tiang mic panjang	6 buah	3	-	3
40	Tiang mic pendek	4 buah	-	-	4
41	Lemari expo	10 unit	7	-	3
42	Meja makan	9 set	6	-	3
43	Dispenser	19 set	12	-	3
44	Lampu hias	5 unit	2	-	3
45	Lemari tipe deks	3 buah	-	-	3
46	Kompor gas dan tabung	1 buah	1	-	-
47	Infokus	9 unit	6	-	3
48	UPS	26 buah	17	-	9
49	Printer laser jet	2 unit	2	-	-
50	Printer canon	18 unit	8	-	10
51	Printer brother	5 unit	5	-	-
51	Printer epson	3 unit	1	-	2
52	Monitor LCD	1 unit	1	-	-

53	Teko listrik	1 unit	1	-	-
54	Vacum cleaner	2 unit	1	-	1
55	Meja komputer	2 unit	1	-	1
56	Handycam	9 unit	3	-	6
57	Gerobak dorong	3 unit	-	1	2
58	Papan whiteboard	2 unit	1	-	1
59	Kursi isabel	685 unit	659	-	26
60	Kursi putar mini	45 unit	-	-	45
62	Teralis besi	668 unit	668	-	-
63	DVD	2 unit	1	-	1
64	Tripot	3 unit	2	-	1
65	Lampu darurat	10 buah	-	-	10
66	Papan struktur	2 unit	2	-	-
67	Rak buku perpustakaan	4 unit	4	-	-
68	Bupet kaca WU 601	1 unit	-	-	1
69	Buku undang-undangan	155 eks	155	-	-
70	Karpet hall	2 paket	1	-	1
71	Kursi teras jati	4 set	4	-	-
72	Rak TV	5 unit	5	-	-
73	Papan nama merek kantor	4 buah	4	-	-
74	Papan nama gantung	60 buah	-	60	-
74	Sofa	3 unit	3	-	-
75	Rak buku/TV/Kembang	1 set	1	-	-
76	Piring, sendok, gelas, cangkir, mangkok	2 set	1	-	1
77	Buku keagamaan	100 eks	100	-	-
78	Buku sejarah	150 eks	150	-	-
79	Buku pengetahuan umum	75 eks	75	-	-
80	Buku pengetahuan sosial	75 eks	75	-	-
81	Buku manajemen SDM	75 eks	75	-	-
82	Buku ilmu politik	100 eks	100	-	-
83	Buku ekonomi dan keuangan	150 eks	150	-	-
84	Hardisk external	2 unit	2	-	-
85	Gambar lambang burung garuda, presiden dan wakil presiden	22 buah	15	-	7
86	Meja hidang dorong	2 unit	2	-	-
87	Papan meding	6 unit	-	6	-
88	Mesin tik brother	2 unit	1	-	1
89	Bangunan pagar	5 paket	5	-	-
90	Stabilizer 1000 watt	2 unit	2	-	-

91	Ambal	32 buah	32	-	-
92	Auning	1 paket	1	-	-
95	Bak penampung air bersih	5 paket	5	-	-
96	Kursi stenlis jok	250 unit	250	-	-
99	Phone intercom	1 paket	1	-	-
100	Brandkas	2 unit	2	-	-
101	Tabung pemadam kebakaran	2 unit	2	-	-
102	Rumah jaga kantor	1 paket	1	-	-
103	Pos satpam	3 paket	3	-	-
104	Ambal mushola	10 lembe	10	-	-
105	Pembuatan drainase	1 paket	1	-	-
106	Mushola	1 unit	1	-	-
107	Camera CCTV	1 paket	1	-	-
108	Ipad	5 unit	5	-	-
109	Micropon beserta tiang	4 unit	4	-	-
110	Vetical blind	330 meter	330	-	-
111	Kursi tamu stenlis	2 unit	2	-	-
112	Meja bundar	6 unit	4	-	2
113	Organ/perlengkapan alat studio	1 paket	1	-	-
114	Tenda	6 unit	-	-	6
115	Pompa air	2 unit	2	-	-
116	Taman kantor	1 paket	1	-	-
117	Pembangunan dapur kantor	1 paket	1	-	-
118	Exsouspan	12 unit	12	-	-
120	Pot kembang, kembang plastik & kembang hidup	1 paket	1	-	-
121	Genset 15000 watt	2 unit	-	-	1
122	Skat tiang	1 paket	1	-	-
123	Dapur rumah tangga	1 paket	1	-	-
124	Gedung sport hall	1 paket	1	-	-
125	Patung burung garuda	2 buah	2	-	-
126	Tower radio link	1 paket	-	-	1
127	Gerbang/gapura	3 paket	3	-	-
128	Meja biro pimpinan	5 unit	5	-	-
129	Kursi kerja pimpinan	5 unit	5	-	-

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Organisasi Sekretariat DPR Papua dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Papua, dan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 dimana Sekretaris DPR Papua berkedudukan sebagai unsur pembantu Gubernur Papua dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya serta bertanggungjawab kepada Gubernur Papua.

Sekretaris DPR Papua mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR Papua, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPR Papua sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, Sekretaris DPR Papua dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPR Papua
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPR Papua
- c. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan rapat DPR Papua
- d. Penyediaan dan pengordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPR Papua
- e. Penyelenggaraan perencanaan dan administrasi keuangan Sekretariat dan DPR Papua
- f. Penyelenggaraan kajian perundang-undangan DPR Papua
- g. Penyelenggaraan fasilitasi pembahasan produk hukum daerah
- h. Penyelenggaraan fasilitasi persidangan dan rapat-rapat DPR Papua
- i. Penyelenggaraan fasilitasi penganggaran
- j. Penyelenggaraan fasilitasi pengawasan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sekretaris DPR Papua dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana tersebut diatas, dibantu oleh 4 orang Kepala Bagian dan 12 orang Kepala Sub.Bagian.

b. Isu Strategis

Permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan antara lain sebagai berikut :

- a. Pemahaman yang berbeda antara Sekretariat dan DPR Papua terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan yang digunakan
- b. Jumlah penyerapan anggaran yang sangat dipengaruhi oleh kinerja kegiatan.
- c. Dinamika politik yang berkembang dilembaga DPR Papua, ikut mewarnai dalam kelancaran pengambilan keputusan.
- d. Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) aparatur.

c. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Sekretariat DPR Papua disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja dan tata cara rewiu atas laporan kinerja instansi pemerintah.
7. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Provinsi papua Tahun 2018 – 2023

d. Sistematika

Laporan Kinerja Sekretariat DPR Papua Tahun 2022 , melaporkan pencapaian kinerja selama tahun 2022 . Capaian kinerja nya diukur dan dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Perjanjian Kinerja itu sendiri merupakan penjabaran Renstra Sekretariat DPR Papua Tahun 2018 – 2023. Berikut sistematika Laporan Kinerja Sekretariat DPR Papua Tahun 2022 :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Gambaran Umum Organisasi
 - 1.2.1 Struktur Organisasi
 - 1.2.2 Susunan Kepegawaian
 - 1.2.3 Sarana dan Prasarana
- 1.3 Tugas Pokok dan Fungsi
- 1.4 Isu Strategis
- 1.5 Landasan Hukum
- 1.6 Sistematika Penulisan

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Indikator Kinerja Utama
- 2.3 Perjanjian Kinerja 2022

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja
- 3.2 Capaian Indikator Kinerja
- 3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja
- 3.4 Akuntabilitas Keuangan

BAB IV : PENUTUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi
2. Laporan Capaian Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPR Papua

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana strategis Sekretariat DPR Papua adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya yang ada. Rencana strategis Sekretariat DPR Papua yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Gubernur Papua terkait dengan perjanjian/kebijakan bahwa Rencana Strategis Sekretariat DPR Papua dibuat pada masa jabatannya dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.

Sekretariat DPR Papua sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masuk di bidang Pemerintahan Umum mengemban tugas untuk turut mewujudkan peningkatan kemampuan sumber daya manusia aparatur baik dari aspek teknis maupun akademis guna meminimalisir kondisi belum optimalnya kinerja Pemerintah Daerah yang telah menjadi isu strategis Pemerintah Provinsi Papua di bidang Pemerintahan Umum.

Kedudukan Renstra dalam pembangunan erat kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sehingga keberadaan Renstra Sekretariat DPR Papua Tahun 2018 – 2023 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kinerja di lingkungan Pemerintahan Provinsi Papua khususnya dalam melaksanakan agenda pembangunan baik dalam RPJPD, RPJMD maupun RKPD yang menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja Sekretariat DPR Papua

Sementara peran Renstra Sekretariat DPR Papua yakni :

1. Diharapkan mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, kemasyarakatan dan demokrasi.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar pelaku pembangunan dan fungsi pemerintah daerah
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien berkeadilan dan berkelanjutan.

Sekretariat DPR Papua sebagai OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Provinsi Papua merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian harapan Provinsi Papua **“Terwujudnya Provinsi Papua yang Bangkit, Mandiri Dan Sejahtera”**. Harapan tersebut merupakan puncak ukuran keberhasilan yang dicita-citakan dalam penyelenggaraan pembangunan jangka menengah Provinsi Papua pada periode 2018 – 2023.

Seiring dengan harapan tersebut, Sekretariat DPR Papua dituntut untuk mampu menterjemahkan visi pembangunan Provinsi Papua 2018 – 2023, melalui penetapan visi kelembagaan yang sejalan dengan isu strategis yang dihadapi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Untuk itu Sekretariat DPR Papua menetapkan visi dan misi 2018 – 2023 yaitu :

“ TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA SEKRETARIAT DPR PAPUA PAPUA SEBAGAI FASILITATOR DAN MEDIATOR ANTARA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF MENUJU TERCIPTANYA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) PROVINSI PAPUA “

Makna dari visi tersebut adalah :

1. Terwujudnya pelayanan prima (excellence service)

Maksudnya adalah bahwa Sekretariat DPR Papua harus mampu memberikan dukungan yang profesional dan berkualitas sesuai dengan prinsip pelayanan profesional yaitu tanggap,

tepat dan proporsional yang secara keseluruhan bermuara pada kepuasan dan kepercayaan anggota DPR Papua atas kinerja Sekretariat DPR Papua.

Selain itu pelayanan prima dimaksud diartikan juga sebagai bentuk pelayanan yang berkualitas dimana dalam hal ini kinerja kegiatan DPR Papua, output dan outcomenya diarahkan untuk memberikan dukungan maksimal terhadap pelaksanaan tugas, fungsi serta wewenang DPR Papua.

2. Sebagai fasilitator

Mengandung makna bahwa Sekretariat DPR Papua harus mampu memberikan dukungan teknis, administrasi dan keahlian secara maksimal sebagai supporting system DPR Papua dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

3. Sebagai mediator

Mengandung makna bahwa Sekretariat DPR Papua harus mampu menjadi mitra strategis yang menjembatani kepentingan/aspirasi Legislatif dan Eksekutif di Provinsi Papua serta harus selalu mengambil sikap pro aktif dalam berkomunikasi dengan lembaga-lembaga yang potensial bersinergi dengan lembaga legislatif guna mewujudkan keharmonisan unsur penyelenggara Pemerintahan di Provinsi Papua.

Terdapat tiga fungsi dasar DPR Papua yang terdiri dari fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Untuk itu dalam mewujudkan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPR Papua, maka Sekretariat DPR Papua menetapkan misi yang diemban pada periode 2018 – 2023 sebagai berikut :

1. Mewujudkan peningkatan kualitas dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPR Papua.
2. Mewujudkan sinergisitas kelembagaan antara eksekutif dan legislatif.
3. Mewujudkan peningkatan sarana dan prasarana penunjang yang baik dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Anggota DPR Papua.

Mengacu kepada visi dan misi tersebut diatas, maka perlu ditetapkan pula tujuan dan sasaran yang akan dicapai untuk lima tahun kedepan. Adapun tujuan Sekretariat DPR Papua adalah :

1. Tercapainya peningkatan kualitas dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPR Papua
2. Tercapainya sinergisitas kelembagaan antara eksekutif dan legislatif di Provinsi Papua

Adapun sasaran yang ingin diwujudkan dalam Renstra Sekretariat DPR Papua adalah “ **MENINGKATNYA KUALITAS DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS, FUNGSI DAN KEDINASAN DPR PAPUA** “

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam Renstra ini adalah “ **TERCAPAINYA PENINGKATAN KUALITAS DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS, FUNGSI DAN KEDINASAN DPR PAPUA UNTUK MEWUJUDKAN SINERGISITAS KELEMBAGAAN ANTARA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF** “

Sementara strategi pencapaian tujuan yang diharapkan yaitu :

- a. Meningkatkan fasilitasi peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPR Papua.
- b. Meningkatkan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kedinasan DPR Papua Kebijakan yang diambil dalam pencapaian tujuan Renstra Sekretariat DPR Papua adalah sebagai berikut :
 - a. Menyediakan fasilitas penunjang peningkatan wawasan dan pengetahuan bagi Pimpinan dan dan Anggota DPR Papua
 - b. Menyediakan fasilitasi penunjang kegiatan Alat Kelengkapan Dewan
 - c. Menyediakan fasilitasi penerimaan tamu kunjungan dan pakaian dinas Anggota DPR Papua.

2.2 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata Pemerintahan yang baik maka ditebitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09.M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Perjanjian Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah.

Pemerintah Provinsi Papua telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Adapun perjanjian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPR Papua tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SEKRETARIAT DPR PAPUA PAPUA TAHUN 2022**

Nama SKPD : Sekretariat DPR PAPUA

Papua Tugas Pokok :

1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPR Papua
2. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPR Papua
3. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR Papua
4. Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPR Papua

Fungsi :

1. Mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat DPR Papua
2. Menyusun rencana, menganalisa dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan/keputusan DPR Papua dan Pimpinan DPR Papua
3. Menyelenggarakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, keprotokolan dan pembekalan DPR Papua
4. Menyiapkan, menyelenggarakan persidangan/rapat dan membuat risalah rapat serta produk DPR Papua
5. Penyelenggaraan pelayanan publikasi dan informasi, memfasilitasi pengaduan/penyampaian aspirasi masyarakat serta menghimpun dokumentasi dan pengelolaan perpustakaan.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja PK Sekretariat DPR Papua Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas dukungan terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan kedinasan DPR Papua	1. Tingkat realisasi penetapan Ranperda	15 Ranperda
		2. Tingkat pelaksanaan pembahasan anggaran	20 Kegiatan
		3. Tingkat pelaksanaan rapat-rapat peripurna dan Badan Musyawarah	55 kali paripurna 72 kali rapat Banmus
		4. Tingkat pelaksanaan reses dan turun lapangan	4 kali reses 69 turun lapangan
		5. Tingkat pelaksanaan konsultasi studi banding, kunjungan kerja dan Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPR Papua	56 kali konsultasi 8 kali study banding 56 kali kungker
		6. Tingkat penyebarluasan kegiatan DPR Papua	69 media elektronik 200 kali media online 105 kali media cetak
		7. Tingkat penerimaan tamu kunjungan DPR Papua	48 kali
		8. Tingkat ketersediaan pakaian dinas dan atribut Anggota DPR Papua	224 stel 69 buah pin

2.3 Perjanjian Kinerja 2022

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang biayai dari sumber dana terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik. Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPR Papua 2022 mengacu pada dokumen Renstra tahun 2018 – 2023, dokumen Rencana Kinerja Tahun (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022. Sekretariat DPR Papua telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Sekretariat DPR Papua Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya fasilitasi terhadap pelaksanaan Tri Fungsi DPR Papua	1.	Meningkatnya fungsi legislasi DPR Papua dalam penetapan Perda	15 Perda
		2.	Meningkatnya fungsi penganggaran dan Pengawasan DPR Papua terhadap APBD Provinsi Papua	20 Kegiatan
		3.	Meningkatnya fungsi pengawasan DPR Papua terhadap Pemerintah dan masyarakat	69 kali Pengawasan

No	Program	Anggaran	Ket
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 233.071.993.641	APBD
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPR Papua	Rp. 184.767.468.359	APBD
3.	Program Dukungan Kebijakan Otonomi Khusus Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Papua	Rp. 184.484.760.000	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan kinerja/pemberi amanah. Sekretariat DPR Papua selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berkinerja melalui penyajian Laporan Kinerja Sekretariat DPR Papua yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra maupun Rencana Tahunan 2022 . Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Papua.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Instansi Pemerintah.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja nya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Dalam laporan ini, Sekretariat DPR Papua dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan masing-masing kelompok indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Tabel 3.1

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

NO	CAPAIAN KINERJA	INTERPRETASI
1	>100 %	Melebihi/melampaui target
2	= 100 %	Sesuai target
3	< 100 %	Tidak mencapai target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.2 Capaian Indikator Kinerja

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis suatu Instansi Pemerintah.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPR Papua Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut :

A. Membandingkan target tahunan dengan realisasi kinerja

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas dukungan pelaksanaan tugas, fungsi dan kedinasan DPR Papua	1. Tingkat realisasi penetapan Ranperda	15 Ranperda	22 Ranperda	73.33 %
		2. Tingkat pelaksanaan pembahasan anggaran	20 Kegiatan	20 Kegiatan	100 %
		3. Tingkat pelaksanaan rapat-rapat peripurna dan Badan Musyawarah	55 paripurna 72 rapat Banmus	55 paripurna 72 rapat Banmus	100 % 100 %
		4. Tingkat pelaksanaan Reses dan turun lapangan	4 kali reses 69 turun lapangan	4 kali reses 69 turun lapangan	100 % 100 %
		5. Tingkat pelaksanaan konsultasi studi banding, kunjungan kerja dan Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPR Papua	69 konsultasi 8 study banding 69 kali kunker	69 konsultasi 8 study banding 69 kali kunker	100 % 100 % 100 %
		6. Tingkat penyebaran kegiatan DPR Papua	69 media elektronik 200 media online 105 media cetak	68 media elektronik 165 media online 104 media cetak	96.43% 82.50% 100 %
		7. Tingkat penerimaan tamu kunjungan DPR Papua	48 kali	48 kali	100 %
		8. Tingkat ketersediaan pakaian dinas dan atribut Anggota DPR Papua	207 stel 69 buah pin	207 stel 69 buah pin	100 % 98 %
Rata-rata capaian					96.80%

Tidak tercapainya realisasi dari indikator kinerja tujuan **tingkat realisasi penetapan ranperda** yang hanya 73.33% disebabkan belum disampaikannya draft ranperda dan juga draft tersebut belum dilengkapi naskah akademik oleh OPD pengusul Perda tersebut.

Kegiatan Pembahasan Anggaran hanya 100% atau sebanyak 20 kali kegiatan tidak dilaksanakan disebabkan tidak dijadwalkan di dalam rapat Banmus karena padatnya kegiatan Anggota Dewan.

Kegiatan turun lapangan melebihi target yang ditetapkan dikarenakan banyaknya pengaduan dari masyarakat yang harus ditindaklanjuti dengan melihat langsung kondisi dilapangan.

Untuk tingkat penerimaan tamu kunjungan DPR Papua disebabkan banyaknya kunjungan tamu pimpinan dan study banding, kunjungan kerja dari lembaga/instansi dari daerah, dan juga demo masyarakat Tingkat ketersediaan pakaian dinas dan atribut Anggota DPR Papua disebabkan adanya Pakaian Khusus Bagi papua (Batik Khas Papua)

B. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2022 .

Tabel 3.3.
Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Kinerja Tahun 2022 dan 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Capaian 2021 %	Capaian 2022 %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kualitas dukungan pelaksanaan tugas, fungsi dan kedinasan DPR Papua	1. Tingkat realisasi penetapan Ranperda	21 ranperda	11 ranperda	60%	73 %
		2. Tingkat pelaksanaan pembahasan anggaran	15 kegiatan	20 kegiatan	75%	100%
		3. Tingkat pelaksanaan rapat-rapat peripurna dan Badan Musyawarah	51 paripurna	55 paripurna	100 %	100 %
			64 banmus	72 banmus	100 %	100 %
		4. Tingkat pelaksanaan reses dan turun lapangan	4 reses	4 reses	100 %	100 %
			56 turun lapangan	69 turun lapangan	100 %	100 %
		5. Tingkat pelaksanaan konsultasi, studi banding, kunjungan kerja dan Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPR Papua	12 konsultasi 8 study banding	69 konsultasi 8 study banding	100 % 100 %	100 % 100 %
			40 kunker	56 kunker	100 %	93 %
6. Tingkat penyebarluasan kegiatan DPR Papua	54 media elektronik 165 media online 100 media cetak	69 media elektronik 200 media online 105 media cetak	100 % 100 % 100 %	96.43 % 82.50 % 100 %		
7. Tingkat penerimaan tamu kunjungan DPR Papua	40 kali	48 kali	100 %	93 %		
8. Tingkat ketersediaan pakaian dinas dan atribut Anggota DPR Papua	55 stel	207 stel	100 %	98%		
	55 pin	69 pin	100 %	93%		

C. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target rencana strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Sasaran Kinerja sampai Tahun 2022 dengan target akhir RPJMD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Realisasi s.d 2022	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas dukungan pelaksanaan tugas, fungsi dan Kedinasan DPR Papua	1. Tingkat realisasi penetapan Ranperda	15 ranperda	11 ranperda	73.00%
		2. Tingkat pelaksanaan pembahasan anggaran	20 kegiatan	20 kegiatan	100 %
		3. Tingkat pelaksanaan rapat-rapat peripurna dan Badan Musyawarah	55 paripurna 72 Banmus	55 paripurna 72 Banmus	100 % 100 %
		4. Tingkat pelaksanaan reses dan turun lapangan	4 reses 69 turun lap	4 reses 69 turun lap	100 % 85.83%
		5. Tingkat pelaksanaan konsultasi, studi banding, kunjungan kerja dan Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPR Papua	69 konsultasi 8 stuban 69 kunker	69 konsultasi 8 stuban 68 kunker	100 % 100 % 98.55%
		6. Tingkat penyebarluasan kegiatan DPR Papua	69 media elektronik 200 media online 105 media cetak	68 media elektronik 165 media online 104 media cetak	98.55% 82.50 % 99.05%
		7. Tingkat penerimaan tamu kunjungan DPR Papua	48 kali	48 kali	100%
		8. Tingkat ketersediaan pakaian dinas dan atribut Anggota DPR Papua	207 stel 69 pin	207stel 69 pin	100% 100%

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Tabel 3.5

Kenaikan dan Penurunan Perda yang disahkan

No	Tahun	Prolegda	Ranperda	Persentase
1	2018	55	55	70,07 %
2	2019	25	25	75,80%
3	2020	25	25	60,00 %
4	2021	25	15	60,00 %
5	2022	25	11	73,33 %

Kenaikan dan penurunan Perda yang disahkan disebabkan karena menyesuaikan dengan kebutuhan prioritas dari masyarakat akan PERDA dalam rangka memberikan efektifitas terhadap pembangunan daerah dan juga tidak tercapainya realisasi ini disebabkan OPD pengusul belum menyampaikan draft ranperda dan juga draft tersebut belum dilengkapi naskah akademik.

E. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (Anggaran)

Secara keseluruhan pelaksanaan program yang mendukung indikator kinerja sasaran ini sudah terlaksana dengan baik, namun demikian dari sisi pelaksanaan anggaran ada beberapa kegiatan yang masih tersisa anggarannya, hal ini disebabkan selain efisiensi sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan seperti :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD realisasi sebesar Rp. 64,272,135,141.00 dan Sisa dana Sebesar Rp. 10,850,478,187.00 dikarenakan Tunjangan dan gaji anggota DPR Papua
 2. Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda sebesar Rp. 1,152,638,115,- dapat dilaksanakan namun tidak sesuai target dalam rapat Banmus karena padatnya kegiatan Anggota Dewan.
 3. Kegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah sebesar Rp. 4,356,893,163,- karena terjadinya padatnya kegiatan anggota DPR Papua.
 4. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD sebesar Rp. 11,112,280,575.00 karena Anggota DPR Papua fokus pada kegiatan kedewanan yang padat .
- F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Perjanjian Kerja

Hasil capaian indikator kinerja dari sasaran strategis ***Meningkatnya kualitas dukungan pelaksanaan tugas, fungsi dan kedinasan DPR Papua*** secara keseluruhan dapat berjalan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022 rata-rata mencapai 98.53%.

Strategi yang diterapkan dalam mewujudkan kinerja tersebut diatas adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melekat pada program-program yaitu :

1. **PROGRAM DUKUNGAN KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS BAGI**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA, Dengan Kegiatan-

Kegiatan sebagai berikut :

- a. Dialog dan Koordinasi Pimpinan DPRD dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama
- b. Pembinaan Kerukunan Masyarakat Papua
- c. Pengawasan atas Pelaksanaan Otsus

- 2. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**
- a. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
 - b. Pembahasan Rancangan Perda
 - c. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
 - d. Pembahasan KUA dan PPAS
 - e. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - f. Pembahasan APBD
 - g. Pembahasan Perubahan APBD
 - h. Pembahasan Laporan Semester
 - i. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
 - j. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
 - k. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
 - l. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
 - m. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
 - n. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
 - o. Pengawasan Penggunaan Anggaran
 - p. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
 - q. Pendalaman Tugas DPRD
 - r. Publikasi dan Dokumentasi Dewan
 - s. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
 - t. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
 - u. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
 - v. Penyusunan Program Kerja DPRD
 - w. Kunjungan Kerja dalam Daerah
 - x. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
 - y. Pelaksanaan Reses
 - z. Pengawasan Kode Etik DPRD
 - aa. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
 - bb. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
 - cc. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
 - dd. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
 - ee. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus

3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- f. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- g. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- h. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- i. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- j. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- k. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- l. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- m. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- n. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- o. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- p. Fasilitasi Kunjungan Tamu
- q. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- r. Pengadaan Mebel
- s. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
- t. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- u. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- v. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- w. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- x. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- y. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- z. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- aa. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD

- bb. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
- cc. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
- dd. Fasilitasi Fraksi DPRD

3.3 Realisasi Anggaran

Dalam tahun 2022, Sekretariat DPR Papua mendapat anggaran sebesar **Rp. 602.324.222.000,- (Enam Ratus Dua Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah)** dari keseluruhan anggaran tahun 2022 tersebut telah terserap sebesar **Rp. 564.082.049.066,- (Lima Ratus Enam Puluh Empat Milyar Delapan Puluh Dua Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Enam Rupiah)** atau 93.65% dengan rincian:

❖	Belanja Pegawai	Rp. 95.779.359.429,-
	Terealisasi sebesar	Rp. 83.975.155.423,- atau 87,68%
❖	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 487.802.006.071,-
	Terealisasi sebesar	Rp. 465.869.218.267,- atau 95.50%
❖	Belanja Modal	Rp. 18.742.856.500,-
❖	Terealisasi sebesar	<u>Rp. 14.237.675.376,- atau 75.96%</u>
	Total Anggaran	Rp. 602.324.222.000,-
	Total Realisasi	<u>Rp. 564.082.049.066,-</u>
	Sisa Anggaran	Rp. 38,242,172,934.00,- (kasda)

Tabel 3.5
CAPAIAN PROGRAM DUKUNGAN KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS BAGI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

KODE REKENING	URAIAN	LOKASI	VOLUME	PAGU DANA (RP)	BOBOT (%)	REAL. KEUANGAN		REAL FISIK (%)		KET
						Rp.	%	FISIK	TTB	
4.02.03	PROGRAM SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA			184,484,760,000	100.00	184,484,760,000	100.00	100.00	100.00	
1.01.1	Dialog dan Koordinasi Pimpinan DPRP dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama		-	136,615,560,000	74.05	136,615,560,000.00	100.00	100.00	74.05	Kegiatan bago Pimpinan dan Anggota DPR Papua
1.01.3	Pembinaan Kerukunan Masyarakat Papua		-	5,004,000,000	2.71	5,004,000,000.00	100.00	100.00	2.71	Kegiatan bago Pimpinan dan Anggota DPR Papua
1.01.4	Pengawasan atas Pelaksanaan Otsus		-	42,865,200,000.00	23.24	42,865,200,000.00	100.00	100.00	23.24	Kegiatan bago Pimpinan dan Anggota DPR Papua

Tabel 3.6
CAPAIAN PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

KODE REKENING	URAIAN	LOKASI	VOLUME	PAGU DANA (RP)	BOBOT (%)	REAL. KEUANGAN		REAL FISIK (%)		KET
						Rp.	%	FISIK	TTB	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			184,767,468,359	100.00	166,379,929,920	90.05	90.05	90.05	
1.01.1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		-	3,017,750,000	1.63	3,012,616,200.00	99.83	90.00	1.63	
1.01.2	Pembahasan Rancangan Perda		-	3,177,500,000	1.72	2,024,861,885.00	63.73	85.00	1.10	
1.01.3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan		-	1,025,000,000	0.55	785,000,000.00	76.59	85.00	0.42	
1.02.1	Pembahasan KUA dan PPAS		-	792,000,000	0.43	792,000,000.00	100.00	90.40	0.43	
1.02.2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		-	792,000,000	0.43	792,000,000.00	100.00	90.40	0.43	
1.02.3	Pembahasan APBD		-	544,450,000	0.29	542,950,000.00	99.72	38.63	0.29	
1.02.4	Pembahasan Perubahan APBD		-	506,000,000	0.27	502,850,000.00	99.38	41.30	0.27	
1.02.5	Pembahasan Laporan Semester		-	234,000,000	0.13	234,000,000.00	100.00	85.00	0.13	
1.02.6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		-	662,500,000	0.36	662,500,000.00	100.00	100.00	0.36	
1.03.1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		-	2,605,200,000	1.41	2,605,200,000	100.00	85.00	1.41	
1.03.2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		-	2,805,600,000	1.52	2,805,600,000	100.00	85.00	1.52	
1.03.3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		-	2,605,200,000	1.41	2,605,200,000	100.00	85.00	1.41	
1.03.4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		-	2,404,800,000	1.30	2,404,800,000	100.00	85.00	1.30	
1.03.6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		-	605,000,000	0.33	605,000,000	100.00	85.00	0.33	
1.03.7	Pengawasan Penggunaan Anggaran		-	2,605,200,000	1.41	2,605,200,000	100.00	85.00	1.41	
1.03.8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		-	1,324,000,000	0.72	1,324,000,000	100.00	85.00	0.72	
1.04.2	Pendalaman Tugas DPRD		-	7,740,670,000	4.19	6,869,450,583.00	88.74	89.93	3.72	
1.04.3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan		-	1,835,000,000	0.99	1,791,202,500.00	97.61	90.00	0.97	
1.04.4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		-	2,420,000,000	1.31	2,417,100,000.00	99.88	90.00	1.31	
1.04.5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		-	600,000,000	0.32	600,000,000.00	100.00	90.00	0.32	
1.04.6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		-	322,000,000	0.17	312,000,000.00	96.89	90.00	0.17	
1.04.7	Penyusunan Program Kerja DPRD		-	301,500,000	0.16	301,500,000.00	100.00	100.00	0.16	
1.05.1	Kunjungan Kerja dalam Daerah		-	12,628,520,000	6.83	8,271,626,837.00	65.50	100.00	4.48	
1.05.2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		-	304,000,000	0.16	302,500,000.00	99.51	95.07	0.16	
1.05.3	Pelaksanaan Reses		-	57,217,800,000	30.97	56,631,374,236.00	98.98	90.00	30.65	
1.06.2	Pengawasan Kode Etik DPRD		-	1,200,000,000	0.65	1,200,000,000.00	100.00	100.00	0.65	
1.08.1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		-	32,704,958,359	17.70	21,592,677,784.00	66.02	100.00	11.69	
1.08.2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		-	208,000,000	0.11	208,000,000	100.00	100.00	0.11	
1.08.3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		-	5,002,500,000	2.71	5,002,499,972	100.00	100.00	2.71	
1.08.4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		-	30,024,000,000	16.25	30,023,899,923.00	100.00	100.00	16.25	
1.08.5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus		-	6,552,320,000	3.55	6,552,320,000.00	100.00	100.00	3.55	

Tabel 3.7
CAPAIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

KODE REKENING	URAIAN	LOKASI	VOLUME	PAGU DANA (RP)	BOBOT (%)	REAL KEUANGAN		REAL FISIK (%)		KET
						Rp.	%	FISIK	TTB	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			233,071,993,641	100.00	213,217,359,146	91.48	98.00	98.00	
1.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		-	2,424,600,000	1.04	2,370,100,000.00	97.75	100.00	1.04	
1.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		-	15,587,986,101	6.69	14,731,420,282.00	94.50	100.00	6.69	
1.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		-	11,202,500,000	4.81	11,177,212,579.00	99.77	100.00	4.81	
1.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		-	769,500,000	0.33	768,000,000.00	99.81	100.00	0.33	
1.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD		-	396,360,000	0.17	396,360,000.00	100.00	100.00	0.17	
1.03.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		-	1,925,038,704	0.83	1,775,962,475.00	92.26	100.00	0.83	
1.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		-	2,292,500,000	0.98	2,274,000,000.00	99.19	100.00	0.98	
1.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		-	2,937,350,000	1.26	2,729,182,580.00	92.91	95.00	1.26	
1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		-	717,210,000	0.31	704,030,115.00	98.16	100.00	0.31	
1.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		-	1,688,955,440	0.72	1,688,955,400.00	100.00	100.00	0.72	
1.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		-	4,145,180,000	1.78	3,377,639,820.00	81.48	85.00	1.78	
1.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		-	5,053,471,500	2.17	5,053,261,730.00	100.00	100.00	2.17	
1.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		-	10,346,146,600	4.44	10,345,746,370.00	100.00	100.00	4.44	
1.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		-	3,865,000,000	1.66	3,864,999,951.00	100.00	100.00	1.66	
1.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		-	495,000,000	0.21	323,510,000.00	65.36	100.00	0.21	
1.06.8	Facilitasi Kunjungan Tamu		-	8,554,000,000	3.67	8,553,914,985.00	100.00	100.00	3.67	
1.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		-	5,761,250,000	2.47	4,923,145,231.00	85.45	100.00	2.47	
1.07.5	Pengadaan Mebel		-	3,336,117,500	1.43	2,905,585,500.00	87.09	97.45	1.43	
1.07.7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		-	3,687,978,500	1.58	1,821,818,426.00	49.40	100.00	1.58	
1.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		-	800,000,000	0.34	800,000,000.00	100.00	100.00	0.34	
1.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		-	3,772,320,000	1.62	3,540,175,613.00	93.85	100.00	1.62	
1.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		-	11,687,025,968	5.01	11,679,951,589.00	99.94	100.00	5.01	
1.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		-	858,260,000	0.37	858,255,349.00	100.00	100.00	0.37	
1.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		-	2,829,000,000	1.21	2,829,000,000.00	100.00	100.00	1.21	
1.09.7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		-	2,950,000,000	1.27	1,725,331,523.00	58.49	100.00	1.27	
1.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		-	29,042,865,000	12.46	27,011,899,487.00	93.01	99.00	12.46	
1.15.1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		-	75,122,613,328	32.23	64,272,135,141.00	85.56	86.00	30.23	
1.15.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		-	1,792,965,000	0.77	1,684,965,000.00	93.98	100.00	0.77	
1.15.3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		-	690,000,000	0.30	690,000,000.00	100.00	100.00	0.30	
1.16.2	Facilitasi Fraksi DPRD		-	18,340,800,000	7.87	18,340,800,000.00	100.00	100.00	7.87	

Tabel 3.8
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung

KODE REKENING	URAIAN	LOKASI	VOLUME	PAGU DANA (RP)	BOBOT (%)	REAL KEUANGAN		SISA DANA	TARGET FISIK (%)		REAL FISIK (%)		KET
						Rp.	%		FISIK	TTB	FISIK	TTB	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			233,071,993,641	100.00	213,217,359,146	91.48	19,854,634,495	0.00	0.00	98.00	98.00	
1.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		-	2,424,600,000	1.04	2,370,100,000.00	97.75	54,500,000.00	0.00	0.00	100.00	1.04	
1.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		-	15,587,986,101	6.69	14,731,420,282.00	94.50	856,565,819.00	0.00	0.00	100.00	6.69	
1.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		-	11,202,500,000	4.81	11,177,212,579.00	99.77	25,287,421.00	0.00	0.00	100.00	4.81	
1.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		-	769,500,000	0.33	768,000,000.00	99.81	1,500,000.00	0.00	0.00	100.00	0.33	
1.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		-	396,360,000	0.17	396,360,000.00	100.00	-	0.00	0.00	100.00	0.17	
1.03.2	Pengamanan Barang Milk Daerah SKPD		-	1,925,038,704	0.83	1,775,962,475.00	92.26	149,076,229.00	0.00	0.00	100.00	0.83	
1.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		-	2,292,500,000	0.98	2,274,000,000.00	99.19	18,500,000.00	0.00	0.00	100.00	0.98	
1.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		-	2,937,350,000	1.26	2,729,182,580.00	92.91	208,167,420.00	0.00	0.00	95.00	1.26	
1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		-	717,210,000	0.31	704,030,115.00	98.16	13,179,885.00	0.00	0.00	100.00	0.31	
1.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		-	1,688,955,440	0.72	1,688,955,400.00	100.00	40.00	0.00	0.00	100.00	0.72	
1.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		-	4,145,180,000	1.78	3,377,639,820.00	81.48	767,540,180.00	0.00	0.00	85.00	1.78	
1.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		-	5,053,471,500	2.17	5,053,261,730.00	100.00	209,770.00	0.00	0.00	100.00	2.17	
1.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		-	10,346,146,600	4.44	10,345,746,370.00	100.00	400,230.00	0.00	0.00	100.00	4.44	
1.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		-	3,865,000,000	1.66	3,864,999,951.00	100.00	49.00	0.00	0.00	100.00	1.66	
1.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		-	495,000,000	0.21	323,510,000.00	65.36	171,490,000.00	0.00	0.00	100.00	0.21	
1.06.8	Facilitasi Kunjungan Tamu		-	8,554,000,000	3.67	8,553,914,985.00	100.00	85,015.00	0.00	0.00	100.00	3.67	
1.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		-	5,761,250,000	2.47	4,923,145,231.00	85.45	838,104,769.00	0.00	0.00	100.00	2.47	
1.07.5	Pengadaan Mebel		-	3,336,117,500	1.43	2,905,585,500.00	87.09	430,532,000.00	0.00	0.00	97.45	1.43	
1.07.7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		-	3,687,978,500	1.58	1,821,818,426.00	49.40	1,866,160,074.00	0.00	0.00	100.00	1.58	
1.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		-	800,000,000	0.34	800,000,000.00	100.00	-	0.00	0.00	100.00	0.34	
1.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		-	3,772,320,000	1.62	3,540,175,613.00	93.85	232,144,387.00	0.00	0.00	100.00	1.62	
1.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		-	11,687,025,968	5.01	11,679,951,589.00	99.94	7,074,379.00	0.00	0.00	100.00	5.01	
1.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		-	858,260,000	0.37	858,255,349.00	100.00	4,651.00	0.00	0.00	100.00	0.37	
1.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		-	2,829,000,000	1.21	2,829,000,000.00	100.00	-	0.00	0.00	100.00	1.21	
1.09.7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		-	2,950,000,000	1.27	1,725,331,523.00	58.49	1,224,668,477.00	0.00	0.00	100.00	1.27	
1.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		-	29,042,865,000	12.46	27,011,899,487.00	93.01	2,030,965,513.00	0.00	0.00	99.00	12.46	
1.15.1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		-	75,122,613,328	32.23	64,272,135,141.00	85.56	10,850,478,187.00	0.00	0.00	86.00	30.23	
1.15.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		-	1,792,965,000	0.77	1,684,965,000.00	93.98	108,000,000.00	0.00	0.00	100.00	0.77	
1.15.3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		-	690,000,000	0.30	690,000,000.00	100.00	-	0.00	0.00	100.00	0.30	
1.16.2	Facilitasi Fraksi DPRD		-	18,340,800,000	7.87	18,340,800,000.00	100.00	-	0.00	0.00	100.00	7.87	

KODE REKENING	URAIAN	LOKASI	VOLUME	PAGU DANA (RP)	BOBOT (%)	REAL KEUANGAN		SISA DANA	TARGET FISIK (%)		REAL FISIK (%)		KET
						Rp.	%		FISIK	TTB	FISIK	TTB	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			184,767,468,359	100.00	166,379,929,920	90.05	18,387,538,439	0.00	0.00	90.05	90.05	
1.01.1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		-	3,017,750,000	1.63	3,012,616,200.00	99.83	5,133,800.00	0.00	0.00	90.00	1.63	
1.01.2	Pembahasan Rancangan Perda		-	3,177,500,000	1.72	2,024,861,885.00	63.73	1,152,638,115.00	0.00	0.00	85.00	1.10	
1.01.3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan		-	1,025,000,000	0.55	785,000,000.00	76.59	240,000,000.00	0.00	0.00	85.00	0.42	
1.02.1	Pembahasan KUA dan PPAS		-	792,000,000	0.43	792,000,000.00	100.00	-	0.00	0.00	90.40	0.43	
1.02.2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		-	792,000,000	0.43	792,000,000.00	100.00	-	0.00	0.00	90.40	0.43	
1.02.3	Pembahasan APBD		-	544,450,000	0.29	542,950,000.00	99.72	1,500,000.00	0.00	0.00	38.63	0.29	
1.02.4	Pembahasan Perubahan APBD		-	506,000,000	0.27	502,850,000.00	99.38	3,150,000.00	0.00	0.00	41.30	0.27	
1.02.5	Pembahasan Laporan Semester		-	234,000,000	0.13	234,000,000.00	100.00	-	0.00	0.00	85.00	0.13	
1.02.6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		-	662,500,000	0.36	662,500,000.00	100.00	-	0.00	0.00	100.00	0.36	
1.03.1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		-	2,605,200,000	1.41	2,605,200,000.00	100.00	-	0.00	0.00	85.00	1.41	
1.03.2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		-	2,805,600,000	1.52	2,805,600,000.00	100.00	-	0.00	0.00	85.00	1.52	
1.03.3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		-	2,605,200,000	1.41	2,605,200,000.00	100.00	-	0.00	0.00	85.00	1.41	
1.03.4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		-	2,404,800,000	1.30	2,404,800,000.00	100.00	-	0.00	0.00	85.00	1.30	
1.03.6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		-	605,000,000	0.33	605,000,000.00	100.00	-	0.00	0.00	85.00	0.33	
1.03.7	Pengawasan Penggunaan Anggaran		-	2,605,200,000	1.41	2,605,200,000.00	100.00	-	0.00	0.00	85.00	1.41	
1.03.8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		-	1,324,000,000	0.72	1,324,000,000.00	100.00	-	0.00	0.00	85.00	0.72	
1.04.2	Pendalaman Tugas DPRD		-	7,740,670,000	4.19	6,869,450,583.00	88.74	871,219,417.00	0.00	0.00	89.93	3.72	
1.04.3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan		-	1,835,000,000	0.99	1,791,202,500.00	97.61	43,797,500.00	0.00	0.00	90.00	0.97	
1.04.4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		-	2,420,000,000	1.31	2,417,100,000.00	99.88	2,900,000.00	0.00	0.00	90.00	1.31	
1.04.5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		-	600,000,000	0.32	600,000,000.00	100.00	-	0.00	0.00	90.00	0.32	
1.04.6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		-	322,000,000	0.17	312,000,000.00	96.89	10,000,000.00	0.00	0.00	90.00	0.17	
1.04.7	Penyusunan Program Kerja DPRD		-	301,500,000	0.16	301,500,000.00	100.00	-	0.00	0.00	100.00	0.16	
1.05.1	Kunjungan Kerja dalam Daerah		-	12,628,520,000	6.83	8,271,626,837.00	65.50	4,356,893,163.00	0.00	0.00	100.00	4.48	
1.05.2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		-	304,000,000	0.16	302,500,000.00	99.51	1,500,000.00	0.00	0.00	95.07	0.16	
1.05.3	Pelaksanaan Reses		-	57,217,800,000	30.97	56,631,374,236.00	98.98	586,425,764.00	0.00	0.00	90.00	30.65	
1.06.2	Pengawasan Kode Etik DPRD		-	1,200,000,000	0.65	1,200,000,000.00	100.00	-	0.00	0.00	100.00	0.65	
1.08.1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		-	32,704,958,359	17.70	21,592,677,784.00	66.02	11,112,280,575.00	0.00	0.00	100.00	11.69	
1.08.2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		-	208,000,000	0.11	208,000,000.00	100.00	-	0.00	0.00	100.00	0.11	
1.08.3	Facilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		-	5,002,500,000	2.71	5,002,499,972.00	100.00	28.00	0.00	0.00	100.00	2.71	
1.08.4	Facilitasi Tugas Pimpinan DPRD		-	30,024,000,000	16.25	30,023,899,923.00	100.00	100,077.00	0.00	0.00	100.00	16.25	
1.08.5	Facilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus		-	6,552,320,000	3.55	6,552,320,000.00	100.00	-	0.00	0.00	100.00	3.55	

KODE REKENING	URAIAN	LOKASI	VOLUME	PAGU DANA (RP)	BOBOT (%)	REAL KEUANGAN		SISA DANA	TARGET FISIK (%)		REAL FISIK (%)		KET
						Rp.	%		FISIK	TTB	FISIK	TTB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4.02.03	PROGRAM SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA			184,484,760,000	100.00	184,484,760,000	100.00	0	0.00	0.00	100.00	100.00	
1.01.1	Diabg dan Koordinasi Pimpinan DPRP dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama		-	136,615,560,000	74.05	136,615,560,000.00	100.00	-	100.00	1.00	100.00	74.05	Kegiatan bago Pimpinan dan Anggota DPR Papua
1.01.3	Pembinaan Kerukunan Masyarakat Papua		-	5,004,000,000	2.71	5,004,000,000.00	100.00	-	100.00	0.00	100.00	2.71	Kegiatan bago Pimpinan dan Anggota DPR Papua
1.01.4	Pengawasan atas Pelaksanaan Otsus		-	42,865,200,000.00	23.24	42,865,200,000.00	100.00	-	100.00	0.00	100.00	23.24	Kegiatan bago Pimpinan dan Anggota DPR Papua

BAB IV PENUTUP

Laporan kinerja instansi Pemerintah Sekretariat DPR Papua ini disusun berdasarkan kebijakan umum anggaran (KUA) tahun anggaran 2022 dan penetapan kinerja tahun 2022 yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai sebagai perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan - kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam memfasilitasi Anggota DPR Papua sering dialami beraneka ragam tuntutan pelayanan. Hal ini disebabkan oleh heterogenitas anggota DPR Papua dengan berbagai karakteristiknya. Kondisi ini menuntut adanya SDM yang cakap dan terampil dalam memberikan pelayanan. Dalam melaksanakan tanggungjawab tersebut dijumpai permasalahan sebagai berikut :

1. Kualitas SDM di Sekretariat DPR Papua dipandang masih kurang, khususnya SDM yang menguasai peraturan bidang hukum, peraturan tentang keuangan serta pengadaan barang/jasa
2. Pemahaman Anggota DPR Papua tentang pengelolaan administrasi keuangan belum maksimal yang mengakibatkan terlambatnya penyusunan pertanggung jawaban keuangan.
3. Cepatnya Perubahan Peraturan Perundang-undangan dari pusat implikasinya sangat dirasakan di daerah, misalnya PP, Permendagri, Permenpan maupun edaran dari pemerintah pusat sering terlambat diterima, kadang sudah direvisi atau diganti dengan peraturan yang baru.

4. Koordinasi antar bagian yang kurang sehingga sering terjadi salah pengertian atau mis communication dalam penyampaian peraturan, kebijakan dalam penyelenggaraan kegiatan.

Langkah-langkah yang diambil untuk perbaikan kedepan :

1. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan Aparatur dengan mengikut sertakan kursus-kursus (legal drafting Peraturan Perundang-Undangan, PP, Permendagri, Permenpan dan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah maupun pengadaan barang/jasa).
2. Terus berupaya memberi masukan kepada Anggota DPR Papua tentang mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban Administrasi Keuangan Daerah.
3. Meningkatkan intensitas koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian, terkait dengan permasalahan yang kita hadapi untuk mendapatkan petunjuk yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Meningkatkan koordinasi antar bagian dengan adanya rapat evaluasi antar bagian yang berkelanjutan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua, semoga bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk capaian kinerja yang akan datang.

Jayapura, Februari 2022

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

Dr. JULIANA J. WAROMI, SE., M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19660314 198603 2 012

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Kinerja Lembaga Legislatif yang Optimal	1 Jumlah Penetapan Ranperda menjadi Perda oleh DPRD	15 Perda
		2 Jumlah Pembahasan Ranperda APBD yang Tepat Waktu	11 Perda
		3 Persentase Kegiatan Pengawasan atas Pelaksanaan Perda yang Terlaksana.	100%
2	Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Administrasi Umum dan Keuangan	4 Persentase Kepuasan Pegawai Terhadap pelayanan Administrasi Umum dan Keuangan.	100%
3	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana kantor	5 Persentase Sarana dan Prasarana kantor dalam kondisi baik.	100%

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2022 dan 2021 Tabel 3.3 Membandingkan Antara Realisasi Tahun 2021 dan 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2020	REALISASI 2021	CAPAIN 2021	CAPAIAN 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Kinerja Lembaga Legislatif yang Optimal	1 Jumlah Penetapan Ranperda menjadi Perda oleh DPRD	25	15	80	100
		2 Jumlah Pembahasan Ranperda APBD yang Tepat Waktu	2	11	60	73
		Persentase Kegiatan Pengawasan atas Pelaksanaan Perda yang Terlaksana.	70%	100%	100	100
2	Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Administrasi Umumdan Keuangan	Persentase Kepuasan Pegawai Terhadap pelayanan Administrasi Umum dan Keuangan	100%	99%	100	100
3	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana kantor	5 Persentase Sarana dan Prasarana kantor dalam kondisi baik.	100	97%	100	100

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2022 Dengan Target Akhir RPJMD Tabel 3.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2021 Dengan RPJMD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD	REALISASI sampai 2022	CAPAIN %	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Kinerja Lembaga Legislatif yang Optimal	1 Jumlah Penetapan Ranperda menjadi Perda oleh DPRD	25	22	88%	Tinggi
		2 Jumlah Pembahasan Ranperda APBD yang Tepat Waktu	2	2	100%	Sangat Tinggi
		3 Persentase Kegiatan Pengawasan atas Pelaksanaan Perda yang Terlaksana.	70%	100%	100%	Sangat Tinggi
2		Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Administrasi Umum dan Keuangan	4 Persentase Kepuasan Pegawai Terhadap pelayanan Administrasi Umum dan Keuangan	100%	99.81	100%
3	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana kantor	5 Persentase Sarana dan Prasarana kantor dalam kondisi baik.	100%	97.97	98%	Tinggi

Tabel 3.2
Perbandingan Target Dan Realisasi Sasaran Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Kinerja Lembaga Legislatif yang optimal Optimal	1 Jumlah Pembahasan Ranperda menjadi Perda oleh DPRD	15	11	73.33	Tinggi
		2 Jumlah Pembahasan Ranperda APBD yang Tepat Waktu	2	2	100	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Administrasi Umum dan Keuangan	3 Persentase Kegiatan atas Pelaksanaan Perda yang Terlaksana.	100%	100%	100	Sangat Tinggi
		4 Persentase Kepuasan Pegawai Terhadap pelayanan Administrasi Umum dan Keuangan	100%	99.81	100	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana kantor	5 Persentase Sarana dan Prasarana kantor dalam kondisi baik.	100%	97.97	98	Sangat Tinggi



Tabel 3.2
Perbandingan Target Dan Realisasi Sasaran Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT KINERJA
1	2	3		5	6	
1	Terwujudnya Kinerja Lembaga Legislatif yang optimal Optimal	1 Jumlah Pembahasan Ranperda menjadi Perda oleh DPRD	15	11	73.33	Tinggi
		2 Jumlah Pembahasan Ranperda APBD yang Tepat Waktu	15	11	73.33	Tinggi
2	Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Administrasi Umum dan Keuangan	3 Persentase Kegiatan atas Pelaksanaan Perda yang Terlaksana.	100%	100%	100	Sangat Tinggi
		4 Persentase Kepuasan Pegawai Terhadap pelayanan Administrasi Umum dan Keuangan	100%	99.81	100%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana kantor	5 Persentase Sarana dan Prasarana kantor dalam kondisi baik.	100%	97.97	98%	Sangat Tinggi

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kerja

NO	RENTANG CAPAIAN KINERJA	KATEGORI CAPAIAN KINERJA
1	2	3
1	91 ≤ 100	Sangat tinggi
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3	70 % ≤ 75 %	Sedang
4	51% ≤ 65 %	Rendah
5	<50%	Sangat Rendah

Sumber : permendagri 53 Tahun 2014